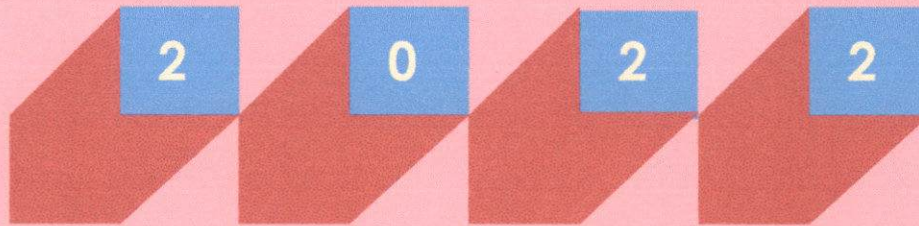


**Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur**

**LAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

||





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Soekarno-Hatta No.3 Telp (0474) 321435/Fax (0474) 321435

M A L I L I

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai salah satu OPD yang melaksanakan Anggaran.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malili, 03 Maret 2023

Kepala Badan



MUHAMMAD SAID, SE.MM

Pangkat : Pembina Tingkat I

Nip : 19790313 200502 1 010

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat Rahmat dan AnugrahNya telah disusun Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Mengamanatkan bahwa satuan kerja perangkat Daerah berkewajiban Menyusun, Menyajikan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

Badan Pendapatan Daerah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Malili, 03 Maret 2023
Kepala Bapenda



MUHAMMAD SAID, SE, M.M
NIP. 19790313 200502 1 010

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Tanggung Jawab.....	I
Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi.....	III
Ringkasan Laporan Keuangan.....	IV
Neraca.....	V
Laporan Realisasi Anggaran.....	VI
Laporan Operasional.....	VII
Laporan Perubahan Ekuitas.....	VIII
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
Bab. II Target Kinerja OPD	
2.1. Indikator Target Kinerja OPD	7
2.2. Indikator Target Pendapatan OPD.....	7
Bab. III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara umum	15
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	21
Bab IV Kebijakan Akuntansi	
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD	22
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	22
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	23
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD	29
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD	
5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca	32
5.1.1. Aset	41
5.1.2. Kewajiban	41
5.1.3. Ekuitas Dana	
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
5.2.1 Pendapatan	42
5.2.2 Belanja	53
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	60
5.3.1. Pendapatan	61
5.3.2. Beban	
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	66

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

6.1. Visi Misi	67
6.2. Tugas Pokok dan Fungsi	67
6.3. Struktur Organisasi	68
6.4. Rekening OPD	69
6.5. Pengungkapan Lain-lain	69

Bab 7 Penutup	71
----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran 1**
 - ❖ LRA Per Kegiatan Per Rekening
- **Lampiran 2**
 - ❖ LRA Per Program Per Kegiatan
- **Lampiran 3**
 - ❖ LPJ Fungsional
- **Lampiran 4**
 - ❖ Register SPP-SPM-SP2D
- **Lampiran 5**
 - ❖ Buku Inventaris dan Mutasi Aset Tahun 2022
- **Lampiran 6**
 - ❖ Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran
 - ❖ Berita Acara Opname Kas Bendahara Penerimaan
- **Lampiran 7**
 - ❖ Berita Acara Rekonsiliasi LRA
 - ❖ Berita Acara Rekonsiliasi SP2D
- **Lampiran 8**
 - ❖ Berita Acara Rekonsiliasi Aset
- **Lampiran 9**
 - ❖ Berita Acara Stock Opname Persediaan
- **Lampiran 10**
 - ❖ Beban Dibayar Dimuka
- **Lampiran 11**
 - ❖ Surat Tanda Setoran (STS)
- **Lampiran 12**
 - ❖ Jurnal Umum Penyesuaian
 - ❖ Jurnal Umum Koreksi

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Setelah Tahun Anggaran 2022 berakhir, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK OPD) **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur menyiapkan Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2022 dan disampaikan kepada OPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD. Laporan Keuangan OPD terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan penyajian Laporan Keuangan OPD **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Kepala **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di OPD **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur.

Laporan Keuangan OPD **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Laporan Keuangan OPD **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur ini sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran **Badan Pendapatan Daerah** menggambarkan perbandingan antara Anggaran OPD Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya meliputi pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.047.864.622.387,11 atau 204,16 % dari anggaran OPD yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.492.872.023.361,00

Realisasi belanja OPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 13.898.319.212,00 atau mencapai 90,44 % dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 15.367.803.150,00

Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Persentase
Pendapatan	1.492.872.023.361,00	3.047.864.622.387,11	204,16
Pendapatan Asli Daerah	219.304.858.780,00	448.773.113.968,25	204,63
Pendapatan Transfer	1.223.583.544.713,00	2.463.821.425.015,86	201,36
Lain-lain Pendapatan yang Sah	49.983.619.868,00	135.270.083.403,00	270,63
Belanja	15.367.803.150,00	13.898.319.212,00	90,44
Belanja Operasi	14.169.332.690,00	12.750.460.652,00	89,99
Belanja Modal	1.198.470.460,00	1.147.858.560,00	95,78

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan OPD **Badan Pendapatan Daerah** yang meliputi Aktiva/Aset, terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Pasiva terdiri dari kewajiban yaitu kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas yang diinvestasikan pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Aktiva per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 78.369.668.445,31 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 69.831.196.323,89, Aset Tetap sebesar Rp. 8.463.722.121,42 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 74.750.000,00. Sedangkan Pasiva sebesar Rp. 78.369.668.445,31 terdiri dari atas Kewajiban sebesar Rp. 372.105.586,63 Ekuitas sebesar Rp. 77.997.562.858,68. Neraca Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset	78.369.668.445,31	0,00
Aset Lancar	69.831.196.323,89	0,00
Aset Tetap	8.463.722.121,42	0,00
Aset Lainnya	74.750.000,00	0,00
TOTAL AKTIVA	78.369.668.445,31	0,00
Kewajiban	372.105.586,63	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	372.105.586,63	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas	77.997.562.858,68	0,00

Ekuitas	77.997.562.858,68	0,00
RK PPKD	0,00	0,00
TOTAL PASIVA	78.369.668.445,31	0,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Realisasi Pendapatan-LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.025.218.990.215,54 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 436.064.523.131,68 . Pendapatan Transfer LO sebesar Rp 2.453.884.383.680,86 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 135.270.083.403,00 yang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit-LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.012.073.839.914,24 Surplus/Defisit-LO tahun 2022 merupakan nilai penyusunan pertama dari Laporan Operasional, sehingga belum dapat dibandingkan Laporan Operasional tahun sebelumnya.

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan LO	3.025.218.990.215,54	0,00
Pendapatan Asli Daerah LO	436.064.523.131,68	0,00
Pendapatan Transfer LO	2.453.884.383.680,86	0,00
Lain-Lain Pendapatan		
Yang Sah LO	135.270.083.403,00	0,00
Beban	13.145.150.301,30	0,00
Beban Operasi	13.145.150.301,30	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
(Surplus/Defisit) LO	3.012.073.839.914,24	0,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00. Surplus/Defisit-LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.012.073.839.914,24. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar-Koreksi Ekuitas Rp. (1.383.200.305.537,27). Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. (1.447.872.884.518,29) dan Ekuitas Akhir untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 181.000.649.858,68. Ekuitas tahun 2022 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	0,00	0,00
Surplus (Defisit LO)	3.012.073.839.914,24	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan :		
Koereksi Ekuitas	(1.383.200.305.537,27)	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	(1.447.872.884.518,29)	0,00
Ekuitas Akhir	181.000.649.858,68	0,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan peranan Pelaporan Keuangan dan Tujuan Pelaporan Keuangan, Indikator Pencapaian Target Kinerja, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan, Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Informasi Non keuangan OPD **Badan Pendapatan Daerah**.

Penyajian Neraca yang menyangkut Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pengakuan transaksi dicatat pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Sedangkan penyajian Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) yang mencakup realisasi pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pengakuan transaksi yang dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Dalam CaLK juga diungkapkan pula kejadian-kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang dikeluarkan.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
(LRA)**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN	1.492.872.023.361,00	3.047.864.622.387,11	204,16	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.304.858.780,00	448.773.113.968,25	204,63	0,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	189.380.000.000,00	385.923.577.928,84	203,78	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.740.807.304,00	46.637.297.097,00	196,44	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.184.051.476,00	16.212.238.942,41	262,16	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.223.583.544.713,00	2.463.821.425.015,86	201,36	0,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	917.997.542.629,00	1.873.456.737.591,00	204,08	0,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	197.842.828.926,00	479.122.352.807,00	242,17	0,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	502.553.133.000,00	1.003.416.447.250,00	199,66	0,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	217.601.580.703,00	390.917.937.534,00	179,65	0,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	103.003.087.000,00	220.266.731.446,00	213,84	0,00
4.2.02.04	Dana Desa	103.003.087.000,00	220.266.731.446,00	213,84	0,00
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	202.582.915.084,00	370.097.955.978,86	182,69	0,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	187.835.890.084,00	350.703.607.959,00	186,71	0,00
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	14.747.025.000,00	19.394.348.019,86	131,51	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	49.983.619.868,00	135.270.083.403,00	270,63	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	49.102.000.000,00	135.270.083.403,00	275,49	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	881.619.868,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	15.367.803.150,00	13.898.319.212,00	90,44	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.169.332.690,00	12.750.460.652,00	89,99	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.231.929.721,00	8.394.112.757,00	90,92	0,00
5.1.02	Belanja Barang	4.937.402.969,00	4.356.347.895,00	88,23	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.198.470.460,00	1.147.858.560,00	95,78	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.198.470.460,00	1.147.858.560,00	95,78	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	1.477.504.220.211,00	3.033.966.303.175,11	205,34	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	1.477.504.220.211,00	3.033.966.303.175,11	205,34	0,00



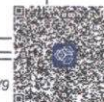


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.492.872.023.361,00	0,00	3.047.864.622.387,11	3.047.864.622.387,11	1.554.992.599.026,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	219.304.858.780,00	0,00	448.773.113.968,25	448.773.113.968,25	229.468.255.188,25
4.1.01	Pajak Daerah	189.380.000.000,00	0,00	385.923.577.928,84	385.923.577.928,84	196.543.577.928,84
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	0,00	1.910.255.334,00	1.910.255.334,00	810.255.334,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	898.800.000,00	0,00	1.599.637.248,00	1.599.637.248,00	700.837.248,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	898.800.000,00	0,00	1.599.637.248,00	1.599.637.248,00	700.837.248,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	190.300.000,00	0,00	289.848.086,00	289.848.086,00	99.548.086,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	190.300.000,00	0,00	289.848.086,00	289.848.086,00	99.548.086,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.900.000,00	0,00	20.770.000,00	20.770.000,00	9.870.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.900.000,00	0,00	20.770.000,00	20.770.000,00	9.870.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.000.000.000,00	0,00	18.518.230.001,20	18.518.230.001,20	9.518.230.001,20
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisny	6.585.000.000,00	0,00	7.986.451.806,00	7.986.451.806,00	1.401.451.806,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisny	6.585.000.000,00	0,00	7.986.451.806,00	7.986.451.806,00	1.401.451.806,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	2.415.000.000,00	0,00	4.807.617.730,20	4.807.617.730,20	2.392.617.730,20
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	2.415.000.000,00	0,00	4.807.617.730,20	4.807.617.730,20	2.392.617.730,20
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	0,00	0,00	5.724.160.465,00	5.724.160.465,00	5.724.160.465,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	0,00	0,00	5.724.160.465,00	5.724.160.465,00	5.724.160.465,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	55.000.000,00	0,00	43.600.000,00	43.600.000,00	(11.400.000,00)
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	55.000.000,00	0,00	43.600.000,00	43.600.000,00	(11.400.000,00)
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	55.000.000,00	0,00	43.600.000,00	43.600.000,00	(11.400.000,00)
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	0,00	2.595.958.541,00	2.595.958.541,00	1.095.958.541,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	427.000.000,00	0,00	1.024.287.226,00	1.024.287.226,00	597.287.226,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	427.000.000,00	0,00	1.024.287.226,00	1.024.287.226,00	597.287.226,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.065.000.000,00	0,00	1.558.347.547,00	1.558.347.547,00	493.347.547,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.065.000.000,00	0,00	1.558.347.547,00	1.558.347.547,00	493.347.547,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	8.000.000,00	0,00	13.323.768,00	13.323.768,00	5.323.768,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	8.000.000,00	0,00	13.323.768,00	13.323.768,00	5.323.768,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	53.200.000.000,00	0,00	101.150.648.137,00	101.150.648.137,00	47.950.648.137,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	53.200.000.000,00	0,00	101.150.648.137,00	101.150.648.137,00	47.950.648.137,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	53.200.000.000,00	0,00	101.150.648.137,00	101.150.648.137,00	47.950.648.137,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	0,00	51.836.614,00	51.836.614,00	26.836.614,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	0,00	51.836.614,00	51.836.614,00	26.836.614,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	0,00	51.836.614,00	51.836.614,00	26.836.614,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	114.000.000.000,00	0,00	229.475.047.953,00	229.475.047.953,00	115.475.047.953,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.700.000.000,00	0,00	11.794.630.030,00	11.794.630.030,00	6.094.630.030,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	5.700.000.000,00	0,00	11.794.630.030,00	11.794.630.030,00	6.094.630.030,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	108.300.000.000,00	0,00	217.680.417.923,00	217.680.417.923,00	109.380.417.923,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	108.300.000.000,00	0,00	217.680.417.923,00	217.680.417.923,00	109.380.417.923,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00	0,00	10.256.601.715,64	10.256.601.715,64	4.256.601.715,64
4.1.01.15.01	PBBP2	6.000.000.000,00	0,00	10.256.601.715,64	10.256.601.715,64	4.256.601.715,64
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.000.000.000,00	0,00	10.256.601.715,64	10.256.601.715,64	4.256.601.715,64
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.500.000.000,00	0,00	21.921.399.633,00	21.921.399.633,00	17.421.399.633,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	0,00	21.921.399.633,00	21.921.399.633,00	17.421.399.633,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	0,00	21.921.399.633,00	21.921.399.633,00	17.421.399.633,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.740.807.304,00	0,00	46.637.297.097,00	46.637.297.097,00	22.896.489.793,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	23.740.807.304,00	0,00	46.637.297.097,00	46.637.297.097,00	22.896.489.793,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.740.807.304,00	0,00	46.504.888.491,00	46.504.888.491,00	22.764.081.187,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.740.807.304,00	0,00	46.504.888.491,00	46.504.888.491,00	22.764.081.187,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	132.408.606,00	132.408.606,00	132.408.606,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	0,00	132.408.606,00	132.408.606,00	132.408.606,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.184.051.476,00	0,00	16.212.238.942,41	16.212.238.942,41	10.028.187.466,41
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	35.498.099,00	0,00	378.865.382,00	378.865.382,00	343.367.283,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
4.1.04.01.01.0001	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	35.498.099,00	0,00	373.465.382,00	373.465.382,00	337.967.283,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	35.498.099,00	0,00	373.465.382,00	373.465.382,00	337.967.283,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	155.536.381,00	0,00	4.034.574.641,03	4.034.574.641,03	3.879.038.260,03
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	155.536.381,00	0,00	4.034.574.641,03	4.034.574.641,03	3.879.038.260,03
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	155.536.381,00	0,00	4.034.574.641,03	4.034.574.641,03	3.879.038.260,03
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00	0,00	7.291.436.344,89	7.291.436.344,89	2.291.436.344,89
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	0,00	7.291.436.344,89	7.291.436.344,89	2.291.436.344,89
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	0,00	7.291.436.344,89	7.291.436.344,89	2.291.436.344,89
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(16.200.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(16.200.000,00)
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(16.200.000,00)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	903.158.669,00	0,00	2.814.006.022,70	2.814.006.022,70	1.910.847.353,70
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	903.158.669,00	0,00	2.814.006.022,70	2.814.006.022,70	1.910.847.353,70
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	903.158.669,00	0,00	2.814.006.022,70	2.814.006.022,70	1.910.847.353,70
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.284.527,00	0,00	50.035.303,78	50.035.303,78	41.750.776,78
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.905.700,00	0,00	22.756.915,00	22.756.915,00	20.851.215,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.905.700,00	0,00	22.756.915,00	22.756.915,00	20.851.215,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.378.827,00	0,00	27.278.388,78	27.278.388,78	20.899.561,78
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	6.378.827,00	0,00	27.278.388,78	27.278.388,78	20.899.561,78
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	64.458.800,00	0,00	324.558.256,00	324.558.256,00	260.099.456,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26.932.800,00	0,00	98.104.661,00	98.104.661,00	71.171.861,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26.932.800,00	0,00	98.104.661,00	98.104.661,00	71.171.861,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.526.000,00	0,00	226.453.595,00	226.453.595,00	188.927.595,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	37.526.000,00	0,00	226.453.595,00	226.453.595,00	188.927.595,00
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	915.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	505.000,00
4.1.04.20.01	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	915.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	505.000,00
4.1.04.20.01.0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	915.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	505.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
4.1.04.23	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.315.925.992,01	1.315.925.992,01	1.315.925.992,01
4.1.04.23.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.315.925.992,01	1.315.925.992,01	1.315.925.992,01
4.1.04.23.01.0001	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	1.315.925.992,01	1.315.925.992,01	1.315.925.992,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.223.583.544.713,00	0,00	2.463.821.425.015,86	2.463.821.425.015,86	1.240.237.880.302,86
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.021.000.629.629,00	0,00	2.093.723.469.037,00	2.093.723.469.037,00	1.072.722.839.408,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	917.997.542.629,00	0,00	1.873.456.737.591,00	1.873.456.737.591,00	955.459.194.962,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	197.842.828.926,00	0,00	479.122.352.807,00	479.122.352.807,00	281.279.523.881,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	45.264.070.021,00	0,00	92.595.808.256,00	92.595.808.256,00	47.331.738.235,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	17.412.601.248,00	0,00	33.737.545.678,00	33.737.545.678,00	16.324.944.430,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	478.297.304,00	0,00	862.308.918,00	862.308.918,00	384.011.614,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	202.953.497,00	0,00	380.895.049,00	380.895.049,00	177.941.552,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	93.625,00	0,00	413.594.587,00	413.594.587,00	413.500.962,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	1.511.998.268,00	1.511.998.268,00	1.511.998.268,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.147.756.909,00	0,00	17.035.401.677,00	17.035.401.677,00	13.887.644.768,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	128.482.388.617,00	0,00	328.649.703.252,00	328.649.703.252,00	200.167.314.635,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	445.500.572,00	445.500.572,00	445.500.572,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	1.109.314.629,00	0,00	173.666.400,00	173.666.400,00	(935.648.229,00)
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.745.353.076,00	0,00	3.315.930.150,00	3.315.930.150,00	1.570.577.074,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	502.553.133.000,00	0,00	1.003.416.447.250,00	1.003.416.447.250,00	500.863.314.250,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	502.553.133.000,00	0,00	1.003.416.447.250,00	1.003.416.447.250,00	500.863.314.250,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.572.224.703,00	0,00	219.369.850.046,00	219.369.850.046,00	126.797.625.343,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	949.538.000,00	0,00	949.538.000,00	949.538.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.889.504.000,00	0,00	26.167.528.056,00	26.167.528.056,00	20.278.024.056,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.985.198.000,00	0,00	3.859.828.000,00	3.859.828.000,00	1.873.630.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	9.751.341.944,00	9.751.341.944,00	9.751.341.944,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	3.544.946.000,00	3.544.946.000,00	3.544.946.000,00
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	43.449.038.495,00	43.449.038.495,00	43.449.038.495,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.753.989.044,00	0,00	5.381.420.118,00	5.381.420.118,00	1.627.431.074,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	21.157.208.357,00	0,00	21.148.613.343,00	21.148.613.343,00	(8.595.014,00)
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.501.412.000,00	0,00	1.501.412.000,00	1.501.412.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	860.749.500,00	0,00	1.802.791.024,00	1.802.791.024,00	942.041.524,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	1.451.436.900,00	0,00	1.700.239.400,00	1.700.239.400,00	248.802.500,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.172.467.564,00	0,00	6.206.727.564,00	6.206.727.564,00	1.034.260.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	4.054.171.839,00	0,00	5.439.712.535,00	5.439.712.535,00	1.385.540.696,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.243.592.447,00	0,00	19.993.164.828,00	19.993.164.828,00	11.749.572.381,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.342.872.472,00	0,00	27.316.105.717,00	27.316.105.717,00	10.973.233.245,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.535.904.567,00	0,00	7.535.904.567,00	7.535.904.567,00	0,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	3.595.686.088,00	3.595.686.088,00	3.595.686.088,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.059.153.000,00	0,00	5.059.153.000,00	5.059.153.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.981.169.260,00	0,00	13.571.142.271,00	13.571.142.271,00	9.589.973.011,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	213.047.000,00	0,00	213.047.000,00	213.047.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Keselamatan Sistem Kesehatan	4.419.810.753,00	0,00	4.419.810.753,00	4.419.810.753,00	0,00
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	4.522.699.343,00	4.522.699.343,00	4.522.699.343,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.029.356.000,00	0,00	171.548.087.488,00	171.548.087.488,00	46.518.731.488,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.675.980.000,00	0,00	39.989.307.630,00	39.989.307.630,00	(6.686.672.370,00)
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.000.000.000,00	0,00	920.000.000,00	920.000.000,00	(80.000.000,00)
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	48.748.722.000,00	0,00	94.165.517.760,00	94.165.517.760,00	45.416.795.760,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.147.000.000,00	0,00	3.748.000.000,00	3.748.000.000,00	601.000.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.370.400.000,00	0,00	5.029.800.000,00	5.029.800.000,00	659.400.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.621.800.000,00	0,00	3.981.950.000,00	3.981.950.000,00	1.360.150.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.407.634.000,00	0,00	6.120.649.346,00	6.120.649.346,00	4.713.015.346,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	12.350.693.000,00	0,00	8.455.942.338,00	8.455.942.338,00	(3.894.750.662,00)
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	128.937.000,00	0,00	88.277.638,00	88.277.638,00	(40.659.362,00)
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.135.393.000,00	0,00	6.937.060.044,00	6.937.060.044,00	2.801.667.044,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	367.383.000,00	367.383.000,00	367.383.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	1.421.406.100,00	1.421.406.100,00	1.421.406.100,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	462.750.000,00	462.750.000,00	462.750.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	417.092.000,00	0,00	335.651.201,00	335.651.201,00	(81.440.799,00)
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	497.605.000,00	0,00	0,00	0,00	(497.605.000,00)
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	528.100.000,00	0,00	524.392.431,00	524.392.431,00	(3.707.569,00)
4.2.01.05	Dana Desa	103.003.087.000,00	0,00	220.266.731.446,00	220.266.731.446,00	117.263.644.446,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	103.003.087.000,00	0,00	220.266.731.446,00	220.266.731.446,00	117.263.644.446,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	103.003.087.000,00	0,00	220.266.731.446,00	220.266.731.446,00	117.263.644.446,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	202.582.915.084,00	0,00	370.097.955.978,86	370.097.955.978,86	167.515.040.894,86
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	187.835.890.084,00	0,00	350.703.607.959,00	350.703.607.959,00	162.867.717.875,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	187.835.890.084,00	0,00	350.703.607.959,00	350.703.607.959,00	162.867.717.875,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19.075.604.000,00	0,00	26.737.756.872,00	26.737.756.872,00	7.662.152.872,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.500.000.000,00	0,00	23.218.699.483,00	23.218.699.483,00	4.718.699.483,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.119.348.019,00	0,00	65.290.075.869,00	65.290.075.869,00	26.170.727.850,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	97.140.938.065,00	0,00	201.156.387.264,00	201.156.387.264,00	104.015.429.199,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.000.000.000,00	0,00	34.300.708.471,00	34.300.708.471,00	20.300.708.471,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.747.025.000,00	0,00	19.394.348.019,86	19.394.348.019,86	4.647.323.019,86
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.314.986.000,00	0,00	5.644.986.000,00	5.644.986.000,00	330.000.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.314.986.000,00	0,00	5.644.986.000,00	5.644.986.000,00	330.000.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	9.432.039.000,00	0,00	13.749.362.019,86	13.749.362.019,86	4.317.323.019,86
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	9.432.039.000,00	0,00	13.749.362.019,86	13.749.362.019,86	4.317.323.019,86
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.983.619.868,00	0,00	135.270.083.403,00	135.270.083.403,00	85.286.463.535,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	49.102.000.000,00	0,00	135.270.083.403,00	135.270.083.403,00	86.168.083.403,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.602.000.000,00	0,00	56.693.939.642,00	56.693.939.642,00	55.091.939.642,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.602.000.000,00	0,00	56.693.939.642,00	56.693.939.642,00	55.091.939.642,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.602.000.000,00	0,00	56.693.939.642,00	56.693.939.642,00	55.091.939.642,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	47.500.000.000,00	0,00	78.576.143.761,00	78.576.143.761,00	31.076.143.761,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	45.000.000.000,00	0,00	33.260.586.835,00	33.260.586.835,00	(11.739.413.165,00)
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	45.000.000.000,00	0,00	33.260.586.835,00	33.260.586.835,00	(11.739.413.165,00)
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	2.500.000.000,00	0,00	2.032.117.416,00	2.032.117.416,00	(467.882.584,00)
4.3.01.04.02.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	2.500.000.000,00	0,00	2.032.117.416,00	2.032.117.416,00	(467.882.584,00)
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	43.283.439.510,00	43.283.439.510,00	43.283.439.510,00
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	43.283.439.510,00	43.283.439.510,00	43.283.439.510,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	881.619.868,00	0,00	0,00	0,00	(881.619.868,00)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	881.619.868,00	0,00	0,00	0,00	(881.619.868,00)
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	881.619.868,00	0,00	0,00	0,00	(881.619.868,00)
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	881.619.868,00	0,00	0,00	0,00	(881.619.868,00)
5	BELANJA DAERAH	15.367.803.150,00	0,00	13.898.319.212,00	13.898.319.212,00	(1.469.483.938,00)
5.1	BELANJA OPERASI	14.169.332.680,00	0,00	12.750.460.652,00	12.750.460.652,00	(1.418.872.028,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01	Belanja Pegawai	9.231.929.721,00	0,00	8.394.112.757,00	8.394.112.757,00	(837.816.964,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.408.252.881,00	0,00	1.358.009.301,00	1.358.009.301,00	(50.243.580,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.031.465.629,00	0,00	996.070.712,00	996.070.712,00	(35.394.917,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.031.465.629,00	0,00	996.070.712,00	996.070.712,00	(35.394.917,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	124.550.419,00	0,00	121.399.128,00	121.399.128,00	(3.151.291,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	124.550.419,00	0,00	121.399.128,00	121.399.128,00	(3.151.291,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	150.813.075,00	0,00	140.174.950,00	140.174.950,00	(10.638.125,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.813.075,00	0,00	140.174.950,00	140.174.950,00	(10.638.125,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.514.000,00	0,00	23.190.000,00	23.190.000,00	676.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.514.000,00	0,00	23.190.000,00	23.190.000,00	676.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	77.193.383,00	0,00	75.568.560,00	75.568.560,00	(1.624.823,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.193.383,00	0,00	75.568.560,00	75.568.560,00	(1.624.823,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.700.000,00	0,00	1.590.642,00	1.590.642,00	(109.358,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.700.000,00	0,00	1.590.642,00	1.590.642,00	(109.358,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.375,00	0,00	15.309,00	15.309,00	(1.066,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.375,00	0,00	15.309,00	15.309,00	(1.066,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.149.481.264,00	0,00	1.111.431.557,00	1.111.431.557,00	(38.049.707,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.149.481.264,00	0,00	1.111.431.557,00	1.111.431.557,00	(38.049.707,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.149.481.264,00	0,00	1.111.431.557,00	1.111.431.557,00	(38.049.707,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perlindungan Objektif Lainnya ASN	6.138.871.428,00	0,00	5.545.083.587,00	5.545.083.587,00	(593.787.842,00)
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.803.305.903,00	0,00	5.380.517.408,00	5.380.517.408,00	(422.788.495,00)
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	46.985.792,00	0,00	44.700.667,00	44.700.667,00	(2.285.125,00)
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	369.394.765,00	0,00	350.718.358,00	350.718.358,00	(18.676.407,00)
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.517.818,00	0,00	577.289,00	577.289,00	(1.940.529,00)
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	55.175.797,00	0,00	32.575.797,00	32.575.797,00	(22.600.000,00)
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.700.293.452,00	0,00	1.631.630.912,00	1.631.630.912,00	(68.662.540,00)
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	821.274,00	0,00	888.844,00	888.844,00	(52.430,00)
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.285.865.515,00	0,00	3.047.426.664,00	3.047.426.664,00	(238.438.851,00)
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	212.427.474,00	0,00	142.607.314,00	142.607.314,00	(69.820.160,00)
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	129.724.016,00	0,00	129.411.563,00	129.411.563,00	(312.453,00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	252.765.526,00	0,00	81.768.179,00	81.768.179,00	(170.999.347,00)
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.766.500,00	0,00	1.534.500,00	1.534.500,00	(2.232.000,00)
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.661.875,00	0,00	843.975,00	843.975,00	(2.817.900,00)
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.309.312,00	0,00	6.146.940,00	6.146.940,00	(3.162.372,00)
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	6.975.000,00	0,00	4.243.125,00	4.243.125,00	(2.731.875,00)
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.231.250,00	0,00	4.092.000,00	4.092.000,00	(1.139.250,00)
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.066.650,00	0,00	29.555.400,00	29.555.400,00	(1.511.250,00)
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	42.815.093,00	0,00	21.408.339,00	21.408.339,00	(21.406.754,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	558.000,00	0,00	0,00	0,00	(558.000,00)
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	4.290.741,00	0,00	2.844.870,00	2.844.870,00	(1.445.871,00)
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.336.875,00	0,00	930.000,00	930.000,00	(406.875,00)
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	7.846.875,00	0,00	5.115.000,00	5.115.000,00	(2.731.875,00)
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.380.625,00	0,00	1.057.500,00	1.057.500,00	(11.323.125,00)
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	123.443.030,00	0,00	3.934.080,00	3.934.080,00	(119.508.950,00)
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	83.700,00	0,00	60.450,00	60.450,00	(23.250,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.600.000,00	0,00	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	535.324.147,00	0,00	379.588.312,00	379.588.312,00	(155.735.835,00)
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	520.989.156,00	0,00	376.001.929,00	376.001.929,00	(144.987.227,00)
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	7.952.500,00	0,00	6.165.000,00	6.165.000,00	(1.787.500,00)
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	55.712.000,00	0,00	42.087.000,00	42.087.000,00	(14.625.000,00)
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	388.125,00	0,00	74.825,00	74.825,00	(313.500,00)
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.332.500,00	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	(4.462.500,00)
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	178.572.778,00	0,00	140.881.852,00	140.881.852,00	(37.690.926,00)
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	411.075,00	0,00	94.200,00	94.200,00	(316.875,00)
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	184.943.178,00	0,00	147.252.252,00	147.252.252,00	(37.690.926,00)
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	64.012.500,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	(43.762.500,00)
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.664.500,00	0,00	15.327.000,00	15.327.000,00	(4.337.500,00)
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	14.334.981,00	0,00	3.586.383,00	3.586.383,00	(10.748.608,00)
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	204.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	(138.000,00)
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	212.625,00	0,00	36.300,00	36.300,00	(176.325,00)
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	513.462,00	0,00	264.385,00	264.385,00	(249.077,00)
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	450.000,00	0,00	182.500,00	182.500,00	(267.500,00)
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	261.750,00	0,00	166.250,00	166.250,00	(95.500,00)
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.872.450,00	0,00	1.271.200,00	1.271.200,00	(601.250,00)
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	2.233.256,00	0,00	920.789,00	920.789,00	(1.312.467,00)
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	32.400,00	0,00	0,00	0,00	(32.400,00)
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	229.173,00	0,00	122.359,00	122.359,00	(106.814,00)
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	70.825,00	0,00	40.000,00	40.000,00	(30.825,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	455.625,00	0,00	220.000,00	220.000,00	(235.625,00)
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	709.425,00	0,00	57.000,00	57.000,00	(652.425,00)
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	7.085.550,00	0,00	237.000,00	237.000,00	(6.848.550,00)
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.650,00	0,00	2.600,00	2.600,00	(2.050,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.937.402.969,00	0,00	4.356.347.895,00	4.356.347.895,00	(581.055.074,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	839.759.769,00	0,00	832.018.005,00	832.018.005,00	(7.741.764,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	839.759.769,00	0,00	832.018.005,00	832.018.005,00	(7.741.764,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.131.000,00	0,00	5.036.850,00	5.036.850,00	(94.150,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	265.905.169,00	0,00	261.041.110,00	261.041.110,00	(4.864.059,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	424.618.600,00	0,00	423.433.100,00	423.433.100,00	(1.185.500,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	25.300.000,00	0,00	24.487.000,00	24.487.000,00	(813.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.555.000,00	0,00	107.272.445,00	107.272.445,00	(282.555,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.250.000,00	0,00	10.747.500,00	10.747.500,00	(502.500,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.517.026.600,00	0,00	1.142.292.360,00	1.142.292.360,00	(374.734.240,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.016.170.000,00	0,00	806.085.760,00	806.085.760,00	(210.084.240,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.750.000,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	(1.050.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	653.500.000,00	0,00	590.928.700,00	590.928.700,00	(62.571.300,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	0,00	644.200,00	644.200,00	(2.355.800,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	132.000.000,00	0,00	101.019.885,00	101.019.885,00	(30.980.115,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Mejalah	3.720.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	(2.420.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	66.000.000,00	0,00	63.492.975,00	63.492.975,00	(2.507.025,00)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.856.600,00	0,00	149.706.600,00	149.706.600,00	(151.150.000,00)
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	300.856.600,00	0,00	149.706.600,00	149.706.600,00	(151.150.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000,00	0,00	186.500.000,00	186.500.000,00	(13.500.000,00)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	200.000.000,00	0,00	186.500.000,00	186.500.000,00	(13.500.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	275.930.000,00	0,00	209.212.880,00	209.212.880,00	(66.717.120,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230.930.000,00	0,00	164.215.880,00	164.215.880,00	(66.714.120,00)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	54.920.000,00	0,00	42.693.880,00	42.693.880,00	(12.226.120,00)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	131.010.000,00	0,00	76.522.000,00	76.522.000,00	(54.488.000,00)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	0,00	44.997.000,00	44.997.000,00	(3.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.000.000,00	0,00	44.997.000,00	44.997.000,00	(3.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.214.686.600,00	0,00	2.082.824.650,00	2.082.824.650,00	(131.861.950,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.214.686.600,00	0,00	2.082.824.650,00	2.082.824.650,00	(131.861.950,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	2.214.686.600,00	0,00	2.082.824.650,00	2.082.824.650,00	(131.861.950,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.198.470.460,00	0,00	1.147.858.560,00	1.147.858.560,00	(50.611.900,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.198.470.460,00	0,00	1.147.858.560,00	1.147.858.560,00	(50.611.900,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	426.400.000,00	0,00	426.400.000,00	426.400.000,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	426.400.000,00	0,00	426.400.000,00	426.400.000,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	426.400.000,00	0,00	426.400.000,00	426.400.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	359.392.400,00	0,00	324.794.000,00	324.794.000,00	(34.598.400,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	264.069.400,00	0,00	229.658.500,00	229.658.500,00	(34.410.900,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	264.069.400,00	0,00	229.658.500,00	229.658.500,00	(34.410.900,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	0,00	12.487.500,00	12.487.500,00	(12.500,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.500.000,00	0,00	12.487.500,00	12.487.500,00	(12.500,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	82.823.000,00	0,00	82.648.000,00	82.648.000,00	(175.000,00)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	23.500.000,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	(100.000,00)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	47.323.000,00	0,00	47.323.000,00	47.323.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00	(75.000,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	42.800.000,00	0,00	42.124.500,00	42.124.500,00	(675.500,00)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Alat Studio	42.800.000,00	0,00	42.124.500,00	42.124.500,00	(675.500,00)
5.2.02.08.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	42.800.000,00	0,00	42.124.500,00	42.124.500,00	(675.500,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	354.878.060,00	0,00	346.040.060,00	346.040.060,00	(8.838.000,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	354.878.060,00	0,00	346.040.060,00	346.040.060,00	(8.838.000,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	354.878.060,00	0,00	346.040.060,00	346.040.060,00	(8.838.000,00)
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	15.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	15.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	15.000.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	1.477.504.220.211,00	0,00	3.033.966.303.175,11	3.033.966.303.175,11	1.556.462.082.964,11
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	1.477.504.220.211,00	0,00	3.033.966.303.175,11	3.033.966.303.175,11	1.556.462.082.964,11



LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.02.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
08	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN	3.025.218.990.215,54	0,00	3.025.218.990.215,54	0
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	436.064.523.131,68	0,00	436.064.523.131,68	0
08.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	373.529.900.062,27	0,00	373.529.900.062,27	0
08.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	46.637.297.097,00	0,00	46.637.297.097,00	0
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.897.325.972,41	0,00	15.897.325.972,41	0
08.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.453.884.383.680,86	0,00	2.453.884.383.680,86	0
08.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.836.586.450.643,00	0,00	1.836.586.450.643,00	0
08.02.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	220.266.731.446,00	0,00	220.266.731.446,00	0
08.02.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	397.031.201.591,86	0,00	397.031.201.591,86	0
08.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	135.270.083.403,00	0,00	135.270.083.403,00	0
08.03.01	Pendapatan Hibah	135.270.083.403,00	0,00	135.270.083.403,00	0
09	BEBAN	13.145.150.301,30	0,00	13.145.150.301,30	0
09.01.00	Beban Pegawai	8.394.112.757,00	0,00	8.394.112.757,00	0
09.02.00	Beban Persediaan	769.349.025,00	0,00	769.349.025,00	0
09.03.00	Beban Jasa	1.232.292.360,00	0,00	1.232.292.360,00	0
09.04.00	Beban Pemeliharaan	208.072.990,00	0,00	208.072.990,00	0
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	2.082.824.650,00	0,00	2.082.824.650,00	0
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	46.138.547,30	0,00	46.138.547,30	0
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	412.359.972,00	0,00	412.359.972,00	0
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	3.012.073.839.914,24	0,00	3.012.073.839.914,24	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3.012.073.839.914,24	0,00	3.012.073.839.914,24	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	3.012.073.839.914,24	0,00	3.012.073.839.914,24	0



Malili, 31 Desember 2022

KEPALA BADAN

MUHAMMAD SAID, SE, MM

NIP. 197903132005021010



LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit : 5-02.0-00.0-00.02.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit : 5-02.0-00.0-00.02.000.0 BADAN PENDAPATAN DAERAH

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	3.012.073.839.914,24	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(1.383.200.305.537,27)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(1.447.872.884.518,29)	0,00
EKUITAS AKHIR	181.000.649.858,68	0,00

Mallu, 31 Desember 2022

KEPALA BADAN

MUHAMMAD SAID, SE, MM
NIP. 197903132005021010



N E R A C A



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 5-02.0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit : 5-02.0-00.0-00.02.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit : 5-02.0-00.0-00.02.000.0 BADAN PENDAPATAN DAERAH

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	1.891.756.633,36	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	7.054.812.774,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	61.930.524.402,00	0,00
Penyisihan Piutang	(1.174.598.030,47)	0,00
Beban Dibayar Dimuka	1.139.890,00	0,00
Persediaan	127.560.655,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	69.831.196.323,89	0,00
ASET TETAP		
Tanah	119.162.438,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.829.793.015,42	0,00
Gedung dan Bangunan	3.881.476.340,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.031.775.300,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.875.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(412.359.972,00)	0,00
JUMLAH ASET TETAP	8.463.722.121,42	0,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	604.800.000,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(530.050.000,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	74.750.000,00	0,00
JUMLAH ASET	78.369.668.445,31	0,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	372.105.586,63	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	372.105.586,63	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	372.105.586,63	0,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	77.997.562.858,68	0,00
JUMLAH EKUITAS	77.997.562.858,68	0,00
JUMLAH EKUITAS	77.997.562.858,68	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	78.369.668.445,31	0,00



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)**

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah sekarang ini, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat dengan mengedepankan anggaran kinerja yang berorientasi hasil, transparansi dan akuntabilitas. Setelah tahun anggaran 2022 berakhir, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 295 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyajikan Laporan Keuangan OPD tahun anggaran yang berkenaan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran OPD. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran OPD berupa Laporan Keuangan OPD (LK OPD) Tahun 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) OPD, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) OPD dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan OPD yang disajikan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh **Badan Pendapatan Daerah** untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada **Badan Pendapatan Daerah** untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Pendapatan Daerah** selama Tahun Anggaran 2022 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan **Badan Pendapatan Daerah** yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan **Badan Pendapatan Daerah** antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan **Badan Pendapatan Daerah** serta hasil-hasil yang telah dicapai.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 90 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 80 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
 14. Peraturan Bupati Luwu Timut Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38).

1.2 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan OPD

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1 Pendapatan

5.2.2 Belanja

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

5.3.2. Beban

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

TARGET KINERJA OPD

2.1 INDIKATOR TARGET KINERJA OPD

Indikator Pencapaian kinerja Anggaran OPD merupakan alat untuk mengukur kinerja OPD dengan berpedoman kepada orientasi hasil yang akan diperoleh atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana kerja OPD (**Renja OPD**) **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur. Rencana Kerja Tahunan OPD (RKT) merupakan tahapan tahapan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis OPD. Pada akhirnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur dalam kerangka perwujudan visi dan misi Bupati Luwu Timur yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan OPD (RKT).

2.2. INDIKATOR TARGET PENDAPATAN OPD

Indikator target kinerja pendapatan OPD **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 meliputi:

Kode Rekening	Pendapatan	Target Kinerja
4	PENDAPATAN	Rp. 1.492.872.023.361,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 219.304.858.780,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	Rp. 189.380.000.000,00
4.1.1.06	Pajak Hotel	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 08 Oktober 2010. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5 tanggal 08 Oktober 2010 □ Rp. 1.100.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	898.800.000,00

4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	190.300.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.900.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 08 Oktober 2010. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6 tanggal 08 Oktober 2010 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tanggal 20 September 2015. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 6 Tanggal 20 September 2015 □ Rp. 9.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.585.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.415.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tanggal 23 Februari 2011. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3 tanggal 23 Februari 2011 □ Rp. 55.000.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	55.000.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tanggal 23 Februari 2011. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3 tanggal 23 Februari 2011 □ Rp. 1.500.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan /Billiard/ Videotron / Megatron	427.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.065.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	8.000.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tanggal 01 Agustus 2011. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 15

		tanggal 01 Agustus 2011 □ Rp. 53.200.000.000,00
4.1.01.10.01	PPJ PT.Bumi Maju Sawit	33.857.000,00
4.1.01.10.02	PPJ PT. CLM/PT. Asia Pasific Mining Resource	15.344.322,00
4.1.01.10.03	PPJ PT. PLN Persero, T.bk	16.124.730.022,00
4.1.01.10.04	PPJ PTPN XIV Bureau	26.068.656,00
4.1.01.10.05	PT. Vale	37.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tanggal 23 Februari 2011. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2 tanggal 23 Februari 2011 □ Rp. 25.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tanggal 08 Oktober 2010. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7 tanggal 08 Oktober 2010 □ Rp. 114.000.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.700.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	108.300.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tanggal 08 Oktober 2010. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7 tanggal 08 Oktober 2010 □ Rp.6.000.000.000,00
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 23 Februari 2011. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 5 tanggal 23 Februari 2011 □ Rp.4.500.000.000,00
4.1.01.16.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak	4.500.000.000,00
4.1.04	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 23.740.807.304,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang dibagikan kepada	

	Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.740.807.304,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 6.184.051.476,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	35.498.099,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	155.536.381,00
4.1.04.05	Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.200.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	903.158.669,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.284.527,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.905.700,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda PBB-P2	6.378.827,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26.932.800,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.526.000,00
4.1.04.20.01	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	915.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.223.583.544.713,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	□ Rp. 1.021.000.629.629,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	□ Rp. 917.997.542.629,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	197.842.828.926,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	502.553.133.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.572.224.703,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.029.356.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	□ Rp. 103.003.087.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	103.003.087.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	□ Rp. 202.582.915.084,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	187.835.890.084,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.747.025.000,00
4.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 49.983.619.868,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	□ Rp. 49.102.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.602.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	47.500.000.000,00
4.3.03	Lain – Lain Pendapatan sesuai dengan	□ Rp. 881.619.868,00

	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	881.619.868,00

2.3. INDIKATOR TARGET BELANJA OPD

Alokasi belanja di **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur terdiri dari anggaran belanja operasi dan belanja modal . Anggaran belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Honorarium dan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKD, sedangkan Belanja Barang dan Jasa terdiri Belanja barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Alokasi belanja dalam bentuk anggaran belanja Program dan kegiatan **Badan pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan OPD. Program dan kegiatan yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari **Program** dan **Kegiatan**, Indikator target kinerja belanja OPD sebagaimana tertuang dalam rencana kerja tahunan **Badan Pendapatan Daerah** Kabupaten Luwu Timur, target kinerja anggaran tahun 2022. Target Kinerja masing - masing program dan kegiatan tahun anggaran 2022 adalah berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TARGET	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.267.464.560	URAIAN	SATUAN
1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.794.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.902.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.002.000	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun	2 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.000.000	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.890.000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen
2	Kegiatan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah	9.286.016.721		

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.155.945.721	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	29 Orang
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.662.000	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	95 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	95.409.000	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dokumen
3	Kegiatan Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.581.000		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.581.000	jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
4	Kegiatan Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.207.259		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.642.259	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	98 %
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	23.105.000	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	100 Orang
3	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	332.460.000	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang – undangan	29 Orang
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.510.600		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.300.000	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2.182.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.131.000	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	6 Jenis
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.411.000	Jumlah barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	36 Exemplar
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	Jumlah tamu yang difasilitasi	250 Orang
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.516.600	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	150 Kali
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.198.470.460		
1	Pengadaan Mebel	82.823.000	Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.115.647.460	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	58 Unit

7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.954.520		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat'	26.154.520	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	3000 Surat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.000.000	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	30 Rekening
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.800.000	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	3 Orang
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.930.000		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.920.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	8 Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.010.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi	1 Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.100.338.590		
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	131.532.000	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan yang disusun	4 Dokumen
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	313.426.000	Jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun	6 Dokumen
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	257.379.000	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak	80 %
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	239.031.600	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata	130 Wajib Pajak
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.319.547.590	Jumlah Objek PBB P2 yang ditetapkan	121.400 Objek Pajak
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	269.265.400	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan	130 Wajib Pajak
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	44.939.000	Persentase Jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi	87 %
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	113.817.000	Jumlah berita acara rekonsiliasi penerimaan retribusi dan pajak daerah dan Jumlah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah	216 Berita Acara dan 12 Laporan
9	Penagihan Pajak Daerah	411.401.000	Persentase tercapainya penerimaan pajak daerah (non PBB)	97 %
TOTAL BELANJA LANGSUNG		15.367.803.150		

Dalam pencapaian target-target tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Badan Pendapatan Daerah dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran oleh Inspektorat. Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2022 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pagu Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah **Rp. 1.492.872.023.361,00,00** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 1.605.237.398.360,2900** atau **107,53 %** dari target pendapatan. Keseluruhan Realisasi pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur, dapat diuraikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
4	PENDAPATAN DAERAH	1.492.872.023.361,00	1.605.237.398.360,29	107,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.304.858.780,00	232.285.946.788,43	105,92
4.1.01	Pajak Daerah	189.380.000.000,00	202.810.479.953,20	107,09
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	1.103.690.870,00	100,34
4.1.1.01.06.01	Pajak Hotel	898.800.000,00	927.053.890,00	182,58
4.1.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	190.300.000,00	164.956.980,00	86,68
4.1.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos	10.900.000,00	11.680.000,00	107,15

	dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)			
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.000.000.000,00	10.547.620.071,20	117,20
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.585.000.000,00	7.986.451.806,00	121,28
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.415.000.000,00	2.561.168.265,20	106,05
4.1.01.08	Pajak Hiburan	55.000.000,00	30.700.000,00	55,82
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	55.000.000,00	30.700.000,00	55,82
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.248.288.396,00	83,22
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan /Billiard/ Videotron / Megatron	427.000.000,00	553.705.207,00	129,67
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.065.000.000,00	682.440.671,00	64,07
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	8.000.000,00	12.142.518,00	151,78
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	53.200.000.000,00	49.782.307.441,00	93,58
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	53.200.000.000,00	49.782.307.441,00	93,57
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	30.774.335,00	123,10
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	30.774.335,00	123,09
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	114.000.000.000,00	115.682.638.034,00	101,48
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.700.000.000,00	5.733.918.805,00	100,59
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	108.300.000.000,00	109.948.719.229,00	101,52
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	5.743.915.644,00	95,73
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	5.743.915.644,00	95,73
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.500.000.000,00	18.640.545.162,00	414,23
4.1.01.16.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	18.640.545.162,00	414,23
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.740.807.304,00	23.740.807.304,00	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang			

	dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.740.807.304,00	23.740.807.304,00	100,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.184.051.476,00	5.734.659.531,23	92,73
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	35.498.099,00	35.498.099,00	100,00
4.1.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	155.536.381,00	101.467.134,00	65,24
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00	3.583.943.758,85	71,68
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.200.000,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	903.158.669,00	1.115.481.511,91	123,51
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.284.527,00	35.264.244,46	425,66
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.905.700,00	22.756.915,00	1.194,15
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda PBBP2	6.378.827,00	12.507.329,46	196,08
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	64.458.800,00	112.388.991,00	174,36
4.1.04.15.03	Pendapatan Denda dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26.932.800,00	60.810.346,00	225,79
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.526.000,00	51.578.645,00	137,45
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Incracht)	915.000,00	1.420.000,00	155,19
4.1.04.23	Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	749.195.792,01	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.223.583.544.713,00	1.330.514.747.320,86	108,74
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.021.000.629.629,00	1.108.810.602.294,00	108,60
4.2.01.01	Dana Perimbangan	917.997.542.629,00	1.005.807.515.294,00	109,57
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	197.842.828.926,00	309.861.621.281,00	156,62
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-DAU	502.553.133.000,00	501.023.438.250,00	99,70
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.572.224.703,00	91.755.247.418,00	99,12
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.029.356.000,00	103.167.208.345,00	82,51

4.2.01.05	Dana Desa	103.003.087.000,00	103.003.087.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	202.582.915.084,00	221.704.145.026,86	109,44
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	187.835.890.084,00	206.876.727.007,00	110,14
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.747.025.000,00	14.827.418.019,86	100,55
4.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.983.619.868,00	42.436.704.251,00	84,90
4.3.01	Pendapatan Hibah	49.102.000.000,00	42.436.704.251,00	86,43
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.602.000.000,00	7.144.000.000,00	445,94
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	47.500.000.000,00	35.292.704.251,00	74,30
4.3.03.03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	881.619.868,00	0,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	881.619.868,00	0,00	0,00

3.1.2 BELANJA

Pagu Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah **Rp. 15.367.803.150,00** terbagi menjadi 2 Program, 9 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 13.898.319.212,00** atau **90.44 %** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur, dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.267.464.560,00	11.168.423.301,00	91,04
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.794.000,00	66.230.340,00	96,27
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.902.000,00	48.445.830,00	95,17
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.002.000,00	2.989.290,00	99,58
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	2.959.330,00	98,64

4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.890.000,00	11.835.890,00	99,54
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.286.016.721,00	8.432.520.497,00	90,81
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	9.155.945.721,00	8.317.697.757,00	90,84
6	Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.662.000,00	33.006.920,00	95,23
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	95.409.000,00	81.815.820,00	85,75
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	13.581.000,00	13.576.150,00	99,96
8	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.581.000,00	13.576.150,00	99,96
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.207.259,00	352.366.995,00	88,94
9	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	40.642.259,00	35.601.840,00	87,60
10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	23.105.000,00	23.095.000,00	99,96
11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	332.460.000,00	293.670.155,00	88,33
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.510.600,00	724.310.319,00	94,13
12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.300.000,00	24.487.000,00	96,79
13	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.182.000,00	2.164.000,00	99,18
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.131.000,00	5.036.850,00	98,17
15	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.411.000,00	157.877.840,00	99,66
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	1.300.000,00	34,95
17	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.250.000,00	10.747.500,00	95,53
18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.516.600,00	522.697.129,00	92,76
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.198.470.460,00	1.147.858.560,00	95,78
19	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	82.823.000,00	82.648.000,00	99,79
20	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.115.647.460,00	1.065.210.560,00	95,48

7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.954.520,00	222.347.560,00	85,86
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.154.520,00	25.390.500,00	97,08
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.000.000,00	165.157.060,00	82,17
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.800.000,00	31.800.000,00	100,00
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.930.000,00	209.212.880,00	75,82
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.920.000,00	42.693.880,00	77,74
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.010.000,00	121.522.000,00	69,04
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	44.997.000,00	99,99
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590,00	2.729.895.911,00	88,05
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	131.532.000,00	131.011.850,00	99,60
27	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Pajak Daerah	131.532.000,00	131.011.850,00	99,60
28	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	313.426.000,00	259.699.389,00	82,86
29	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	257.379.000,00	256.217.750,00	99,55
30	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	239.031.600,00	238.932.680,00	99,96
31	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.319.547.590,00	1.010.012.400,00	76,54
32	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	269.265.400,00	268.910.400,00	99,87
33	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	44.939.000,00	44.852.600,00	99,81
34	Sub Kegiatan Penelitian Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	113.817.000,00	112.133.915,00	98,52
35	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	411.401.000,00	408.124.927,00	99,20
Jumlah		15.367.803.150,00	13.898.319.212,00	90,44

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang mempengaruhi kinerja OPD adalah :

- ✚ Keterbatasan SDM pada bidang keuangan serta kurangnya personil yang ditempatkan dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan masih mengalami tata kelola keuangan yang tidak tertib sehingga berimplikasi kepada output yang tidak maksimal.
- ✚ Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- ✚ Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- ✚ Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bidang-bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan - satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dikeluarkan dari BUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- 1) ***Kas di Kas Daerah*** merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 2) ***Kas di Bendahara Penerimaan*** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.
- 3) ***Kas di Bendahara Pengeluaran*** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing, maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan / atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4.3.5 Aset Tetap

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

1. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2. Peralatan dan Mesin

- ✚ Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- ✚ Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya

balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.6 Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

4.3.7 Aset lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Bapenda Kabupaten Luwu Timur, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.8 Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui

adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

4.3.9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.10 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) ***Ekuitas Dana Lancar*** merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam jangka pendek.

Penilaian :

- a. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
- b. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;
- c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi.

Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

- 2) ***Ekuitas Dana Diinvestasikan*** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
- 3) ***Ekuitas Dana Dicadangkan*** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- 4) ***Ekuitas Dana Donasi*** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi

- atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
 - f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
 - g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
 - h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
 - i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan OPD lainnya;
 - j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OPD;
 - k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
 - l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
 - m. Pendapatan/penerimaan OPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
 - n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
 - o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
 - p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
 - q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan atas pos-pos neraca menyesuaikan dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca. Komposisi Neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021	% Naik/ (Turun)
Aset	78.369.668.445,31	0,00	0,00
Kewajiban	372.105.586,63	0,00	0,00
Ekuitas	77.997.562.858,68	0,00	0,00

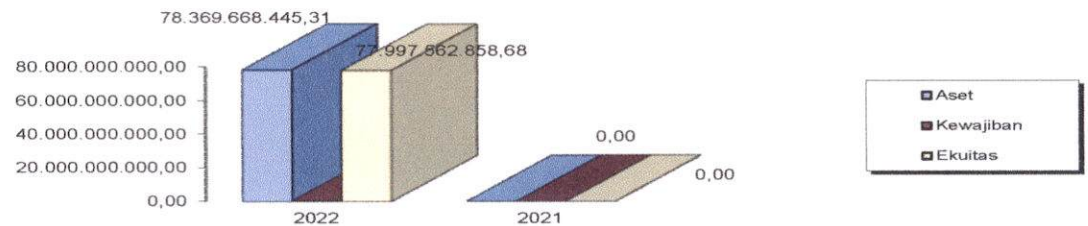
Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 78.369.668.445,31** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 69.831.196.323,89** dan Aset Tetap sebesar **Rp. 8.463.722.121,42** dan Aset Lainnya sebesar **Rp. 74.750.000,00**

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 372.105.586,63** merupakan kewajiban jangka pendek sebesar **Rp. 372.105.586,63**.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 77.997.562.858,68**.

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti dibawah ini :

Grafik 1. Komposisi Neraca



5.1.1. Aset

5.1.1.1. Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel 1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2022(Rp)	TA 2021 (Rp)
Bank Sulselbar Cabang Malili (93.002.0000029697)	0,00	0,00
Uang tunai	0,00	0,00
Jumlah Kas	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname Kas Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sesuai Berita Acara Opname Kas pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 (terlampir).

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar Rp 15.619.127,00- sampai dengan 30 Desember 2022 telah disetor ke Kas Umum Daerah sesuai STS No : 004/STS-Pengembalian/BAPENDA/XII/2022 (terlampir).

5.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 sesuai Berita Acara Opname Kas Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 (terlampir).

5.1.1.1.3. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 senilai **Rp. 1.139.890,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Belanja STNK Nomor Kendaraan DP.6959 G senilai Rp. 302.450,00 per tanggal 11 Oktober 2022 dengan beban dibayar dimuka senilai Rp. 226.837,50
2. Biaya Belanja STNK Nomor Kendaraan DP. 6958 G senilai Rp. 302.450,00 per tanggal 20 Oktober 2022 dengan beban dibayar dimuka senilai Rp. 226.837,50
3. Biaya Belanja STNK Nomor Kendaraan DP. 6321 G senilai Rp. 152.750,00 per tanggal 07 November 2022 dengan beban dibayar dimuka senilai Rp. 76.375,00
4. Biaya Belanja STNK Nomor Kendaraan DP. 6323 G senilai Rp. 137.350,00 per tanggal 15 Juni 2022 dengan beban dibayar dimuka senilai Rp. 68.675,00
5. Biaya Belanja STNK Nomor Kendaraan DP. 6917 G senilai

Rp. 232.500,00 per tanggal 20 Juli 2022 dengan beban dibayar dimuka senilai Rp. 135.625,00

6. Biaya Belanja STNK Nomor Kendaraan DP. 6747 G senilai Rp. 93.000,00 per tanggal 19 Desember 2022 dengan beban dibayar dimuka senilai Rp. 54.250,00
7. Biaya Belanja STNK Nomor Kendaraan DP. 1202 G senilai Rp. 45.500,00 per tanggal 06 September 2022 dengan beban dibayar dimuka senilai Rp. 34.125,50
8. Biaya Belanja STNK Nomor Kendaraan DP. 1284 ST senilai Rp. 634.330,00 per tanggal 26 Agustus 2022 dengan beban dibayar dimuka senilai Rp. 317.165,00

5.1.1.1.4. Persediaan

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 127.560.655,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2
Rincian Persediaan

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Alat Tulis Kantor	4.555.480,00	0,00
Kertas Berharga	109.551.975,00	0,00
Cetak Blangko PBB-P2	13.453.200,00	0,00
Jumlah Kas	127.560.655,00	0,00

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai Berita Acara Opname Kas pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 (terlampir).

5.1.1.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 78.369.668.445,31** dan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(a)	Tanah	119.162.438,00	0,00
(b)	Peralatan dan Mesin	3.829.793.015,42	0,00
(c)	Gedung dan Bangunan	3.881.476.340,00	0,00
(d)	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.031.775.300,00	0,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	13.875.000,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(412.359.972,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap		8.463.722.121,42	0,00

Selama Tahun 2022 mutasi aset tetap sebagai berikut :

Penambahan :

- ✚ Mutasi Masuk Aset Tanah dari BKAD sebesar Rp. 119.162.436,00
- ✚ Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.147.858.560,00
- ✚ Mutasi Masuk Aset Peralatan dan Mesin dari BKAD sebesar Rp. 2.490.034.455,42
- ✚ Mutasi Masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Bapelitbangda sebesar Rp. 194.000.000,00

- ✚ Mutasi masuk Aset Gedung dan Bangunan dari BKAD sebesar Rp. 3.342.719.970,00
- ✚ Koreksi catat Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 538.756.370,00
- ✚ Mutasi Masuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari BKAD sebesar Rp 1.031.775.300,00
- ✚ Mutasi Masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan dari BKAD sebesar Rp. 13.875.000,00

Pengurangan :

- ✚ Reklas dari Aset Peralatan dan Mesin ke Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.100.000,00
- ✚ Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 412.359.972,00

Adapun Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap per 1 Januari 2022	R p . 0,00
Penambahan :	
Belanja Modal	Rp 1.147.858.560,00
Belanja Barang/Jasa	Rp -
Hibah/Hadiah	Rp -
Mutasi Masuk	Rp 7.730.323.533,42
Reklasifikasi	Rp -
Utang Retensi 2022	Rp -
Jumlah Penambahan	Rp 8.878.182.093,42
Pengurangan :	
Penghapusan	Rp -
Penyerahan	Rp -
Reklasifikasi	Rp 2.100.000,00
Hibah	Rp -
Mutasi Keluar	Rp -
Utang retensi 2022	Rp -
Akumulasi Penyusutan	Rp. 412.359.972,00
Jumlah Pengurangan	Rp 414.459.972,00
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2022	Rp 8.463.722.121,42

(a) Tanah

Saldo Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 119.162.438,00**, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	
Tanah Kantor	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
Penambahan	
Mutasi Masuk Aset Tanah Kantor dari BKAD	Rp. 119.162.438,00
Jumlah	Rp. 119.162.438,00
Penghapusan/pengurangan	
Tanah	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp. 0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp. (0,00)
Saldo Akhir	Rp. 119.162.438,00

Penambahan Aset Tanah Tahun 2022 sebesar **Rp.119.162.438,00**

- Mutasi Masuk Aset Tanah dari BKAD tahun 2022 sebesar **Rp.119.162.438,00**.

(b) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 3.665.238.692,42** dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal		0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penambahan		
Alat Angkutan	Rp.	774.494.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	55.420.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	1.556.041.593,42
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp.	77.377.500,00
Alat Laboratorium	Rp.	171.135.920,00
Komputer	Rp.	1.168.894.002,00
Alat Keselamatan Kerja	Rp.	8.500.000,00
Jumlah	Rp.	3.829.793.015,42

Penghapusan/pengurangan	
Peralatan dan Mesin	Rp. 0,00
Jumlah	0,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	Rp. (164.554.323,00)
Total Akumulasi Penyusutan	Rp. (164.554.323,00)
Saldo Akhir	Rp 3.665.238.692,42

- Penambahan aset peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar **Rp. 3.829.793.015,42**
- Pengurangan aset peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar **Rp 0,00**
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan Tahun 2022 sebesar **Rp. 164.554.323,00**

(c) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 3.687.798.325,00** dengan perincian sebagai berikut :

- Penambahan Aset Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar **Rp. 3.881.476.340,00**
- Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar **Rp. 0,00**
- Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar **Rp. 193.678.015,00**

(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 977.647.666,00** dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal		0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penambahan		
Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp.	1.031.775.300,00
Jumlah	Rp.	1.031.775.300,00
Penghapusan/pengurangan		
Jaln.irigasi dan Jaringan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	Rp.	<i>(54.127.634,00)</i>
Total Akumulasi Penyusutan	Rp.	<i>(54.127.634,00)</i>
Saldo Akhir	Rp.	977.647.666,00

- Penambahan Aset Jaringan,Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar **Rp. 1.031.775.300,00**
- Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar **Rp.0,00.**
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahun 2022 sebesar **Rp. 54.127.634,00** (*terlampir*).

(e). **Aset Tetap lainnya**

Saldo Aset tetap lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 0,00**, dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal		0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penambahan		
Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penghapusan/pengurangan		
Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.	<i>0,00</i>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.	<i>(0,00)</i>
Saldo Akhir	Rp.	0,00

- Penambahan Aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar **Rp. 0,00**
- Pengurangan Aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar **Rp. 0,00**

(f). **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 13.875.000,00**, dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal		0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penambahan		
Mutasi Masuk dari BKAD Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.	13.875.000,00
Jumlah	Rp.	13.875.000,00
Penghapusan/pengurangan		
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.	,00)
Jumlah	Rp.	,00)
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.	0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp.	(0,00)
Saldo Akhir	Rp.	13.875.000,00

- Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2022 sebesar **Rp13.875.000,00**.
- Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2022 sebesar **Rp. 0,00**

(e) **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur periode 31 Desember 2022 sebesar **Rp (412.359.972,00)**. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nama Aset		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Nilai Buku 31 Desember 2022
1. Aset Tetap				
1	Tanah	119.162.438,00	0,00	119.162.438,00
2	Peralatan dan Mesin	3.829.793.015,42	164.554.323,00	3.665.238.692,42
3	Gedung Bangunan	3.881.476.340,00	193.678.015,00	3.687.798.325,00
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	1.031.775.300,00	54.127.634,00	977.647.666,00
5	Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00
Jumlah		8.876.082.093,42	(412.359.972,00)	8.463.722.121,42

5.1.2. Kewajiban

5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 372.105.586,63,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.3. Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah **Rp 0,00** dan **0,00**.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 3.047.864.622,387,11**, **Rp 77.997.562.858,68** dan **Rp 00**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.047.864.622.387,11 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Kode Rekening	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	1.492.872.023.361,00	3.047.864.622.387,11	1.554.992.559.026,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.304.858.780,00	448.773.113.968,25	229.468.255.188,25
4.1.01	Pajak Daerah	189.380.000.000,00	385.923.577.928,84	196.543.577.928,84
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	1.910.255.334,00	810.255.334,00
4.1.1.01.06.01	Pajak Hotel	898.800.000,00	1.599.637.248,00	700.837.248,00
4.1.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	190.300.000,00	289.848.086,00	99.548.086,00
4.1.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.900.000,00	20.770.000,00	9.870.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.000.000.000,00	18.518.230.001,20	9.518.230.001,20
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.585.000.000,00	7.986.451.806,00	1.401.451.806,00
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.415.000.000,00	4.807.617.730,20	2.392.617.730,20
4.1.01.08	Pajak Hiburan	55.000.000,00	43.600.000,00	(11.400.000,00)
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	55.000.000,00	43.600.000,00	(11.400.000,00)
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	2.595.958.541,00	1.095.958.541,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan /Billiard/ Videotron / Megatron	427.000.000,00	1.024.287.226,00	597.287.226,00

4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.065.000.000,00	1.558.347.547,00	493.347.547,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	8.000.000,00	13.323.768,00	5.323.768,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	53.200.000.000,00	101.150.648.137,00	47.950.648.137,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	53.200.000.000,00	101.150.648.137,00	47.950.648.137,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	51.836.614,00	26.836.614,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	51.836.614,00	26.836.614,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	114.000.000.000,00	229.475.047.953,00	115.475.047.953,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.700.000.000,00	11.794.630.030,00	6.094.630.030,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	108.300.000.000,00	217.680.417.923,00	109.380.417.923,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	10.256.601.715,64	4.256.601.715,64
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	10.256.601.715,64	4.256.601.715,64
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.500.000.000,00	21.921.399.633,00	17.421.399.633,00
4.1.01.16.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	21.921.399.633,00	17.421.399.633,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.740.807.304,00	46.504.888.491,00	22.764.081.187,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.740.807.304,00	46.504.888.491,00	22.764.081.187,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.184.051.476,00	16.212.238.942,41	10.028.187.466,41
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	35.498.099,00	378.865.382,00	343.367.283,00
4.1.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	155.536.381,00	4.034.574.641,03	3.879.038.260,03
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00	7.291.436.344,89	2.291.436.344,89
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.200.000,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	903.158.669,00	2.814.006.022,70	1.910.847.353,70
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.284.527,00	50.035.303,78	41.750.776,78
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.905.700,00	22.756.915,00	20.851.215,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda PBBP2	6.378.827,00	27.278.388,78	20.899.561,78
4.1.04.15	Pendapatan dari	64.458.800,00	324.558.256,00	260.099.456,00

	Pengembalian			
4.1.04.15.03	Pendapatan Denda dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26.932.800,00	98.104.661,00	71.171.861,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.526.000,00	226.453.595,00	188.927.595,00
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Incracht)	915.000,00	1.420.000,00	505.000,00
4.1.04.23	Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	1.315.925.922,01	1.315.925.992,01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.223.583.544.713,00	2.463.821.425.015,86	1.240.237.880.302,86
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.021.000.629.629,00	2.093.723.469.037,00	1.072.722.839.408,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	917.997.542.629,00	1.873.456.737.591,00	955.459.194.962,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	197.842.828.926,00	4.79.122.352.807,00	281.279.523.881,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-DAU	502.553.133.000,00	1.003.416.447.250,00	500.863.314.250,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.572.224.703,00	219.369.850.046,00	125.797.625.343,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.029.356.000,00	171.548.087.488,00	46.518.731.488,00
4.2.01.05	Dana Desa	103.003.087.000,00	220.266.731.446,00	117.263.644.446,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	202.582.915.084,00	370.097.955.978,86	167.515.040.894,86
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	187.835.890.084,00	350.703.607.959,00	162.867.717.875,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.747.025.000,00	19.394.348.019,86	4.647.323.019,86
4.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.983.619.868,00	135.270.083.403,00	85.286.463.535,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	49.102.000.000,00	135.270.083.403,00	86.168.083.403,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.602.000.000,00	56.693.939.642,00	55.091.939.642,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	47.500.000.000,00	78.576.143.761,00	31.076.143.761,00
4.3.03.03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	881.619.868,00	0,00	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	881.619.868,00	0,00	0,00

Dapat dijelaskan bahwa dari Nilai Realisasi Pendapatan Rp.3.047.864.622.387,11 terdapat Mutasi saldo awal pendapatan LRA Tahun 2021 dari BKAD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Saldo Awal Tahun 2021

Kode Rekening	Pendapatan	Saldo Awal Tahun 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	1.413.655.827.651,82
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	193.723.085.992.82
4.1.01	Pajak Daerah	183.113.097.975,64
4.1.01.06	Pajak Hotel	806.564.464,00
4.1.1.01.06.01	Pajak Hotel	672.583.358,00
4.1.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	124.891.106,00
4.1.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	9.090.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.970.609.930,00
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.246.449.465,00
4.1.1.07.03	Jasa Boga	5.724.160.465,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	12.900.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	12.900.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.347.670.145,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan /Billiard/ Videotron / Megatron	470.582.019,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	875.906.876,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.181.250,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	51.368.340.696,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	51.368.340.696,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	21.062.279,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	21.062.279,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	113.792.409.919,00

4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	6.060.711.225,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	107.731.698.694,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.512.686.071,64
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.512.686.071,64
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.280.854.471,00
4.1.01.16.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak	3.280.854.471,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	132.408.606,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	132.408.606,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.747.579.411,18
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	337.967.283,00
	Hasil Penjualan Tanah	5.400.000,00
4.1.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	3.933.107.507,03
4.1.04.05	Jasa Giro	3.707.492.586,04
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.698.524.510,79
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	14.771.059,32
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda PBBP2	14.771.059,32
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	212.169.265,00
4.1.04.15.03	Pendapatan Denda dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	37.294.315,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	174.874.950,00
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Incracht)	0,00
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.417.000,00
4.1.04.23	Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	566.730.200,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.127.099.362.507,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.705.551.555,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	861.441.907.109,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	169.260.731.526,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-DAU	502.393.009.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	121.407.287.440,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	68.380.879.143,00
4.2.01.05	Dana Desa	117.263.644.446,00

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	148.393.810.952,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	143.826.880.952,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.566.930.000,00
4.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.833.379.152,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	92.833.379.152,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	45.549.939.642,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	43.283.439.510,00
4.3.03.03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	0,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	0,00

Selain itu terdapat Realisasi Anggaran selama Tahun 2022 sebesar **Rp. 1.605.237.398.360,29**.

Adapun Realisasi Anggaran Pendapatan selama Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan selama Tahun 2022 dan 2021

Kode Rekening	Pendapatan	Realiasasi		Naik/Turun	
		Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.605.237.398.360,29	0,00	1.605.237.398.360,29	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	232.285.946.788,43	0,00	232.285.946.788,43	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	202.810.479.953,20	0,00	202.810.479.953,20	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.103.690.870,00	0,00	1.103.690.870,00	0,00
4.1.1.01.06.01	Pajak Hotel	927.053.890,00	0,00	927.053.890,00	0,00
4.1.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	164.956.980,00	0,00	164.956.980,00	0,00
4.1.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	11.680.000,00	0,00	11.680.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.547.620.071,20	0,00	10.547.620.071,20	0,00

4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.986.451.806,00	0,00	7.986.451.806,00	0,00
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.561.168.265,20	0,00	2.561.168.265,20	0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	30.700.000,00	0,00	30.700.000,00	0,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	30.700.000,00	0,00	30.700.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.248.288.396,00	0,00	1.248.288.396,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan /Billiard/ Videotron / Megatron	553.705.207,00	0,00	553.705.207,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	682.440.671,00	0,00	682.440.671,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	12.142.518,00	0,00	12.142.518,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	49.782.307.441,00	0,00	49.782.307.441,00	0,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	49.782.307.441,00	0,00	49.782.307.441,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	30.774.335,00	0,00	30.774.335,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	30.774.335,00	0,00	30.774.335,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	115.682.638.034,00	0,00	115.682.638.034,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.733.918.805,00	0,00	5.733.918.805,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	109.948.719.229,00	0,00	109.948.719.229,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.743.915.644,00	0,00	5.743.915.644,00	0,00
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.743.915.644,00	0,00	5.743.915.644,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	18.640.545.162,00	0,00	18.640.545.162,00	0,00
4.1.01.16.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak	18.640.545.162,00	0,00	18.640.545.162,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.740.807.304,00	0,00	23.740.807.304,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.740.807.304,00	0,00	23.740.807.304,00	0,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.734.659.531,23	0,00	5.734.659.531,23	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	35.498.099,00	0,00	35.498.099,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	101.467.134,00	0,00	101.467.134,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.583.943.758,85	0,00	3.583.943.758,85	0,00

4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.115.481.511,91	0,00	1.115.481.511,91	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	35.264.244,46	0,00	35.264.244,46	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	22.756.915,00	0,00	22.756.915,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda PBBP2	12.507.329,46	0,00	12.507.329,46	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	112.388.991,00	0,00	112.388.991,00	0,00
4.1.04.15.03	Pendapatan Denda dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	60.810.346,00	0,00	60.810.346,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	51.578.645,00	0,00	51.578.645,00	0,00
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Incracht)	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00
4.1.04.23	Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	749.195.792,01	0,00	749.195.792,01	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.330.514.747.320,86	0,00	1.330.514.747.320,86	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.108.810.602.294,00	0,00	1.108.810.602.294,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.005.807.515.294,00	0,00	1.005.807.515.294,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	309.861.621.281,00	0,00	309.861.621.281,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-DAU	501.023.438.250,00	0,00	501.023.438.250,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.755.247.418,00	0,00	91.755.247.418,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	103.167.208.345,00	0,00	103.167.208.345,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	103.003.087.000,00	0,00	103.003.087.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.704.145.026,86	0,00	221.704.145.026,86	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	206.876.727.007,00	0,00	206.876.727.007,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.827.418.019,86	0,00	14.827.418.019,86	0,00
4.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.436.704.251,00	0,00	42.436.704.251,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	42.436.704.251,00	0,00	42.436.704.251,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.144.000.000,00	0,00	7.144.000.000,00	0,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	35.292.704.251,00	0,00	35.292.704.251,00	0,00
4.3.03.03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------

Adapun Realisasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam DPA selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 1.605.237.398.360,29** atau sebesar **107,53 %** dari total pagu senilai Rp. **1.492.872.023.361,00**. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan selam Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan selama Tahun 2022

Kode Rekening	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
4	PENDAPATAN DAERAH	1.492.872.023.361,00	1.605.237.398.360,29	107,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.304.858.780,00	232.285.946.788,43	105,92
4.1.01	Pajak Daerah	189.380.000.000,00	202.810.479.953,20	107,09
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	1.103.690.870,00	100,34
4.1.1.01.06.01	Pajak Hotel	898.800.000,00	927.053.890,00	182,58
4.1.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	190.300.000,00	164.956.980,00	86,68
4.1.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	10.900.000,00	11.680.000,00	107,15
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.000.000.000,00	10.547.620.071,20	117,20
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.585.000.000,00	7.986.451.806,00	121,28
4.1.1.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.415.000.000,00	2.561.168.265,20	106,05
4.1.01.08	Pajak Hiburan	55.000.000,00	30.700.000,00	55,82
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	55.000.000,00	30.700.000,00	55,82
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.248.288.396,00	83,22
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan /Billiard/			

	Videotron / Megatron	427.000.000,00	553.705.207,00	129,67
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.065.000.000,00	682.440.671,00	64,07
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	8.000.000,00	12.142.518,00	151,78
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	53.200.000.000,00	49.782.307.441,00	93,58
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	53.200.000.000,00	49.782.307.441,00	93,57
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	30.774.335,00	123,10
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	30.774.335,00	123,09
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	114.000.000.000,00	115.682.638.034,00	101,48
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	5.700.000.000,00	5.733.918.805,00	100,59
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	108.300.000.000,00	109.948.719.229,00	101,52
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	5.743.915.644,00	95,73
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	5.743.915.644,00	95,73
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.500.000.000,00	18.640.545.162,00	414,23
4.1.01.16.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	18.640.545.162,00	414,23
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.740.807.304,00	23.740.807.304,00	100,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	23.740.807.304,00	23.740.807.304,00	100,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.184.051.476,00	5.734.659.531,23	92,73
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	35.498.099,00	35.498.099,00	100,00
4.1.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	155.536.381,00	101.467.134,00	65,24
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00	3.583.943.758,85	71,68
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.200.000,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	903.158.669,00	1.115.481.511,91	123,51

4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.284.527,00	35.264.244,46	425,66
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.905.700,00	22.756.915,00	1.194,15
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda PBBP2	6.378.827,00	12.507.329,46	196,08
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	64.458.800,00	112.388.991,00	174,36
4.1.04.15.03	Pendapatan Denda dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	26.932.800,00	60.810.346,00	225,79
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	37.526.000,00	51.578.645,00	137,45
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Incracht)	915.000,00	1.420.000,00	155,19
4.1.04.23	Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	749.195.792,01	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.223.583.544.713,00	1.330.514.747.320,86	108,74
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.021.000.629.629,00	1.108.810.602.294,00	108,60
4.2.01.01	Dana Perimbangan	917.997.542.629,00	1.005.807.515.294,00	109,57
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	197.842.828.926,00	309.861.621.281,00	156,62
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-DAU	502.553.133.000,00	501.023.438.250,00	99,70
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.572.224.703,00	91.755.247.418,00	99,12
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125.029.356.000,00	103.167.208.345,00	82,51
4.2.01.05	Dana Desa	103.003.087.000,00	103.003.087.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	202.582.915.084,00	221.704.145.026,86	109,44
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	187.835.890.084,00	206.876.727.007,00	110,14
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.747.025.000,00	14.827.418.019,86	100,55
4.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.983.619.868,00	42.436.704.251,00	84,90
4.3.01	Pendapatan Hibah	49.102.000.000,00	42.436.704.251,00	86,43
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.602.000.000,00	7.144.000.000,00	445,94
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	47.500.000.000,00	35.292.704.251,00	74,30
4.3.03.03	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang –	881.619.868,00	0,00	0,00

	undangan			
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	881.619.868,00	0,00	0,00

5.2.2. BELANJA

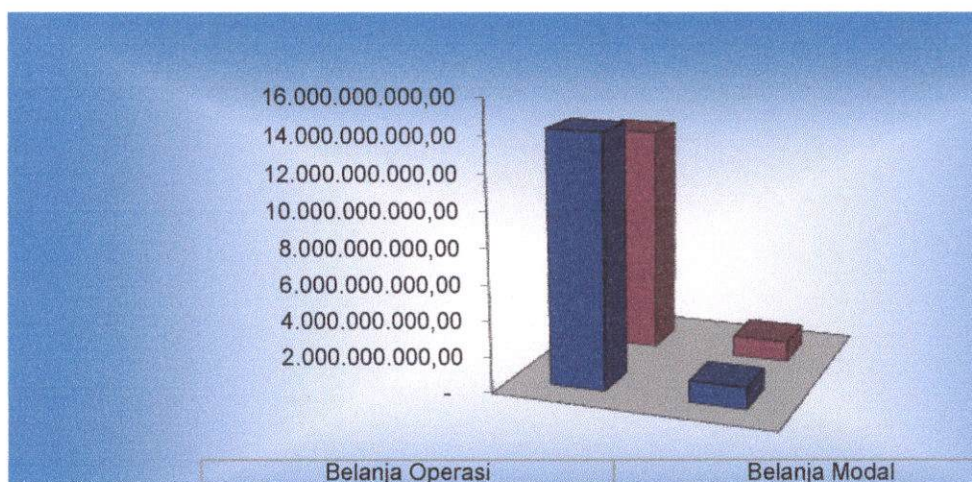
Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022. Realisasi Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp 13.898.319.212,00** atau sebesar **90,44 %** dari total anggaran sebesar **Rp 15.367.803.150,00**

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Kode Jenis	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
5.1	Belanja Operasi	14.169.332.690,00	12.750.460.652,00	89,98
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.231.929.721,00	8.394.112.757,00	90,92
5.1.02	Belanja Barang	4.937.402.969,00	4.356.347.895,00	88,23
5.2	Belanja Modal	1.198.470.460,00	1.147.858.560,00	95,78
	Jumlah	15.367.803.150,00	13.898.319.212,00	90,44

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat dalam grafik berikut :



Grafik 2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 13.898.319.212,00 belum mempunyai perbandingan dengan tahun sebelumnya disebabkan pengelolaan anggaran baru dimulai pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 10
Perbandingan realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
		TA 2022	TA 2021	Rp	%
5.1	Belanja Pegawai	8.394.112.757,00	0,00	8.394.112.757,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.356.347.895,00	0,00	4.356.347.895,00	0,00
5.3	Belanja Modal	1.147.858.560,00	0,00	1.147.858.560,00	0,00
	Jumlah Total	13.898.319.212,00	0,00	13.898.319.212,00	0,00

A. Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp. 9.231.929.721,00** sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 8.394.112.757,00** atau **90,92 %** dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Gaji Pokok ASN	1.031.465.629,00	997.915.712,00	98,74
Tunjangan Keluarga ASN	124.550.419,00	119.554.128,00	99,98
Tunjangan Jabatan ASN	150.813.075,00	143.864.950,00	99,39
Tunjangan Fungsional ASN	22.514.000,00	21.345.000,00	94,81
Tunjangan Beras ASN	77.193.383,00	73.723.560,00	99,50
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.700.000,00	1.590.642,00	93,56
Pembulatan Gaji ASN	16.375,00	15.309,00	93,49
Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.149.481.264,00	1.111.431.557,00	98,68
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.138.871.429,00	5.545.083.587,00	90,32
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	535.324.147,00	379.588.312,00	70,90
Jumlah	9.231.929.721,00	8.394.112.757,00	90,92

Realisasi belanja pegawai TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 9.231.929.721,00-** dan **Rp. 0,00-**. Perbedaan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan karena OPD yang baru terbentuk dan pengelolaan anggaran dimulai pada tahun anggaran 2022.

Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai untuk Tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Gaji Pokok ASN	997.915.712,00	0,00	997.915.712,00	0,00
Tunjangan Keluarga ASN	119.554.128,00	0,00	119.554.128,00	0,00
Tunjangan Jabatan ASN	143.864.950,00	0,00	143.864.950,00	0,00
Tunjangan Fungsional ASN	21.345.000,00	0,00	21.345.000,00	0,00
Tunjangan Beras ASN	73.723.560,00	0,00	73.723.560,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.590.642,00	0,00	1.590.642,00	0,00
Pembulatan Gaji ASN	15.309,00	0,00	15.309,00	0,00
Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.111.431.557,00	0,00	1.111.431.557,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.545.083.587,00	0,00	5.545.083.587,00	0,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	379.588.312,00	0,00	379.588.312,00	0,00
Jumlah	8.394.112.757,00	0,00	8.394.112.757,00	0,00

B. Belanja Barang dan Jasa

Pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 **Rp 4.937.402.969,00** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp 4.356.347.895,00** atau **88,23 %** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Bahan Habis Pakai	839.759.769,00	832.018.005,00	99,07
Belanja Jasa Kantor	1.016.170.000,00	806.085.760,00	79,32
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.856.600,00	149.706.600,00	49,76
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230.930.000,00	164.215.880,00	71,11
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	44.997.000,00	99,99
Belanja Perjalanan Dinas	2.214.686.600,00	2.082.824.650,00	94,05
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
Jumlah	4.937.402.969,00	4.356.347.895,00	88,23

Realisasi belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 4.356.347.895,00** dan **Rp. 0,00**. Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Bahan Habis Pakai	832.018.005,00	0,00	832.018.005,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	806.085.760,00	0,00	806.085.760,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	149.706.600,00	0,00	149.706.600,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.215.880,00	0,00	164.215.880,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.997.000,00	0,00	44.997.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.082.824.650,00	0,00	2.082.824.650,00	0,00

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
Realisasi Belanja	4.356.347.895,00	0,00	4.356.347.895,00	0,00

C. Belanja Modal

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah **Rp. 1.198.470.460,00** sedangkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.147.858.560,00** atau **99,77 %** dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Modal Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2022

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	426.400.000,00	426.400.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor	264.069.400,00	229.658.500,00	49,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	12.487.500,00	99,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja	82.823.000,00	82.648.000,00	99,78
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Studio	42.800.000,00	42.124.500,00	98,42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	354.878.000,00	346.040.060,00	97,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	15.000.000,00	8.500.000,00	56,67
Jumlah	1.198.470.460,00	1.147.858.560,00	99,77

Realisasi belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.147.858.560,00** dan **Rp. 0,00**.

Rincian perbandingan realisasi belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	426.400.000,00	0,00	426.400.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor	229.658.500,00	0,00	229.658.500,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.487.500,00	0,00	12.487.500,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja	82.648.000,00	0,00	82.648.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Studio	42.124.500,00	0,00	42.124.500,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	346.040.060,00	0,00	346.040.060,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
Jumlah	1.147.858.560,00	0,00	1.147.858.560,00	0,00

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1. PENDAPATAN

Realisasi Laporan Operasional pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.025.218.990.215,54 dan 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan TA 2021

Kode Rekening	Pendapatan	Realisasi		Naik/Turun	
		Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
08	PENDAPATAN DAERAH	3.025.218.990.215,54	0,00	3.025.218.990.215,54	0,00
08.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	436.064.523.131,68	0,00	436.064.523.131,68	0,00
08.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	373.529.900.062,27	0,00	373.529.900.062,27	0,00
08.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46.637.297.097,00	0,00	46.637.297.097,00	0,00
08.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.897.325.972,41	0,00	15.897.325.972,41	0,00
08.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.453.884.383.680,86	0,00	2.453.884.383.680,86	0,00
08.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.836.586.450.643,00	0,00	1.836.586.450.643,00	0,00
08.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	220.266.731.446,00	0,00	220.266.731.446,00	0,00
08.02.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	397.031.202.591,86	0,00	397.031.202.591,86	0,00
08.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	135.270.083.403,00	0,00	135.270.083.403,00	0,00

Dapat dijelaskan bahwa dari Nilai Laporan Operasional Pendapatan-LO sebesar Rp.3.025.218.990.215,54 terdapat Mutasi saldo awal Tahun 2021 dari BKAD.

Selain itu terdapat Realisasi Pendapatan Laporan Operasional selama Tahun 2022. Adapun Realisasi Laporan Operasional Pendapatan LO selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Laporan Operasional Pendapatan selama Tahun 2022 dan TA 2021

Kode Rekening	Pendapatan	Realisasi		Naik/Turun	
		Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
08	PENDAPATAN DAERAH	1.575.432.863.685,72	0,00	1.575.432.863.685,72	0,00
08.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	232.568.014.160,06	0,00	232.568.014.160,06	0,00
08.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	202.395.990.321,78	0,00	202.395.990.321,78	0,00
08.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.437.364.307,05	0,00	24.437.364.307,05	0,00
08.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.734.569.531,23	0,00	5.734.569.531,23	0,00
08.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.225.380.136.992,86	0,00	1.225.380.136.992,86	0,00
08.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	998.810.305.963,00	0,00	998.810.305.963,00	0,00
08.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	226.569.831.029,86	0,00	226.569.831.029,86	0,00
08.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	117.484.712.532,80	0,00	117.484.712.532,80	0,00

5.3.2. BEBAN

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2022 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun Anggaran 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1	Beban Pegawai	8.394.112.757,00.	-	8.394.112.757,00.
2	Beban Persediaan	769.349.025,00	-	769.349.025,00
3	Beban Jasa	1.232.292.360,00	-	1.232.292.360,00
4	Beban Pemeliharaan	208.072.990,00	-	208.072.990,00
5	Beban Perjalanan Dinas	2.082.824.650,00	-	2.082.824.650,00
9	Beban Penyisihan Piutang	46.138.547,00	-	46.138.547,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	412.359.972,00	-	412.359.972,00
	Jumlah	13.145.150.301.30		13.145.150.301.30,

5.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 8.394.112.757,00** dan **Rp 0,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal:

Tabel 14
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

<i>Uraian Jenis Beban</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>Naik (turun) %</i>
Beban Gaji Pokok PNS	996.070.712,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga	121.399.128,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan	140.174.950,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum	23.190.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Beras	75.568.560,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.590.642,00	0,00	0,00

Beban Pembulatan Gaji	15.309,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.111.431.557,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya	5.545.083.587,00	0,00	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.600.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	10.200.000,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	379.588.312,00	0,00	0,00
Jumlah	8.394.112.757,00	0,00	0,00

5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 4.751.037.544,3** dan **Rp 00,00**. Adapun penjabaran definisi untuk masing-masing beban, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Persediaan** merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- **Beban Jasa** adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
- **Beban Pemeliharaan** merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
- **Beban Perjalanan Dinas** merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 15
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	2022	2021	Naik (turun)%
Beban Persediaan	769.349.025,00	0,00	0,00
Beban Bahan – Bahan Lainnya	5.036.850,00	0,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	256.485.630,00	0,00	0,00
Beban Alat Kantor-Bahan Cetak	363.219.600,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	24.487.000,00	0,00	0,00

Kantor-Alat Listrik			
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	107.272.445,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.747.500,00	0,00	0,00
Beban Jasa	1.232.292.360,00	0,00	0,00
Beban Jasa Kantor	806.085.760,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	149.706.600,00	0,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	186.500.000,00	0,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.000.000,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan	208.072.990,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	163.075.990,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.997.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	2.082.824.650,00	0,00	0,00
Jumlah	4.292.539.025,00	0,00	0,00

5.3.2.4. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp 412.359.972,00** dan **Rp 0,00**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

<i>Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>Naik (turun) %</i>
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	46.275.333,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	1.418.336,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	4.365.597,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	30.015.835,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.496.567,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Studio	166.500,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Labpratorium	1.100.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.775.728,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	32.647.414,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	28.938.846,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat SAR	354.167,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	127.518.442,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	66.159.573,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jembatan	38.084.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	16.043.634,00	0,00	0,00
Jumlah	412.359.972,00	0,00	0,00

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perubahan ekuitas nilai aset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	3.012.073.839.914,24	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas	(1.383.200.305.537,27)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(1.447.872.884.518,29)	0,00
EKUITAS AKHIR	181.000.649.858,68	0,00

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD



6.1. VISI MISI

6.1.1. VISI

Visi Kabupaten Luwu Timur periode 2021-2016 adalah “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

6.1.2. MISI

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengarah pada Misi ke-4 yaitu Terciptanya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

6.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6.2.1. TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

6.2.2. FUNGSI

- ❖ Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- ❖ Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- ❖ Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- ❖ Perumusan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari 2 Sub Bidang :
 - Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
 - Subbidang Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah
3. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 3 Sub Bidang :
 - Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari 2 Subbidang :
 - Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi
 - Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan

6.4. REKENING SKPD

Rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah Bank Sulselbar Cabang Malili dengan Nomor Rekening : **093.002.0000029697** an. Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur.

6.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 20/F-04/I/Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022, tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022

Kuasa Pengguna Anggaran : **Muhammad Said, SE,MM**

Bendahara Pengeluaran : **Fatmawati , Amd**

Pengurus Barang : **Hasri, S.AN**

- Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 02 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, terdiri dari :
 - ❖ **Marlina,SE** selaku PPTK Sekretariat;
 - ❖ **Chaeruddin Arfah. M, S.IP** selaku PPTK bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - ❖ **Herawati Rijal, SE** selaku PPTK bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
 - ❖ **Andi Muh. Reza Ashari, S.STP** selaku PPTK bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- ❖ **Irmawati. M,ST** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
- ❖ Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 03 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Badan Pendapatan Daerah, yaitu atas nama **Agus Abdullah,SE, M.Si.**

PENUTUP



Kewajiban menyajikan Laporan Keuangan pada akhir tahun 2022 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berakhir 31 Desember 2022, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.